

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PELAKSANAAN
KEGIATAN 1.20.1.20.05.17.38
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Program/Kegiatan :
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah
3. Nama KPA/PPTK :
 - Nama KPA : VEVI RAHMANAWATI
 - Nama PPTK : LASTO
4. Rujukan
 - a. KAK Perencanaan Nomor
 - b. RPJMD :

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018
 - c. Renstra SKPD :

Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD
5. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum Tugas Fungsi
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018
 - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum Penerima Manfaat

Dalam rangka memenuhi hak PNS maka pelayanan gaji haruslah tepat dan cermat sehingga PNS menerima gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain gaji dan tunjangan PNS yang ditangani dalam pelayanan gaji adalah Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil), Tambahan Penghasilan Daerah untuk PNS, Iuran Wajib PNS, BPJS Kesehatan, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Bappetarum, SKPP dan lain sebagainya .

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Register Penerimaan SPM
- Register SP2D
- Lampiran Berkas Pengajuan SPM
- SIMDA
- SIMGAJI TASPEN
- Blanko SP2D

6. Keluaran Kegiatan

- Output : Terprosesnya SP2D gaji dan Belanja Tidak Langsung Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku
- Outcome : Terlayannya hak PNS sesuai ketentuan yang berlaku

7. Strategi Pencapaian Keluaran :

a. Metode pelaksanaan/program kerja/konsep pelaksanaan (tenaga ahli, alokasi SDM sesuai tingkat keahlian) :

- Mencatat seluruh ajuan SPM dari SKPD : 2 orang
- Meneliti kelengkapan berkas SPM : 2 orang
- Memproses ajuan SPM menjadi SP2D : 2 orang
- Memproses SPM dan SP2D pajak : 2 orang
- Menguji SP2D : 4 orang
- Menyerahkan SP2D : 1 orang

b. Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan

- Jadwal detail pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah

NO	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
2	Uang Lembur PNS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
3	Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
4	Belanja Cetak		x				X						
5	Belanja Penggandaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Belanja Barang Perlengkapan Komputer	x			x			x			x		x

➤ Jadwal penyerapan anggaran

Triwulan I	Rp. 53.419.000,00
Triwulan II	Rp. 49.169.000,00
Triwulan III	Rp. 40.669.000,00
Triwulan IV	Rp. 41.065.000,00

8. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian SPJ SKPD dilaksanakan Januari sampai dengan Desember 2017

9. Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Umum

➤ Spesifikasi Teknis

- Menerima SPM
- Meneliti kelengkapan berkas SPM
- Meregister SPMP2D
- Proses SP2D
- Pengujian SP2D

➤ Spesifikasi Umum

Terpenuhinya gaji dan hak-hak PNS sesuai ketentuan yang berlaku

10. Biaya yang diperlukan

Rp. 184.322.000,00

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN
1	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	52.320.000,00
2	Uang Lembur PNS	104.352.000,00
3	Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga	2.000.000,00
4	Belanja Cetak	21.250.000,00
5	Belanja Penggandaan	2.400.000,00
6	Belanja Barang Perlengkapan Komputer	2.000.000,00

11. Penerima Manfaat

- Penerima manfaat dari Kegiatan Pelayanan Gaji Daerah adalah seluruh PNS

12. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan evaluasi Pelaporan dilaksanakan bulan Januari sampai dengan Desember 2017

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Perbendaharaan

PPTK,
Kasubid Belanja Gaji

VEVI RAHMANAWATI, S.Sos. MM.

Pembina

NIP.19740116 199703 2 002

L A S T O

Penata

NIP.19601212 198003 1 010

Mengetahui
Pengguna Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19641117 199301 1 003